

STUDI TENTANG KONTRIBUSI KALTIM POST DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Reza Rizaldy Muttaqin¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kontribusi Kaltim Post dalam membantu pemerintah kota Samarinda mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan empat prinsip, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan daya tanggap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui purposive sampling dan accidental sampling dengan key informan adalah pimpinan redaksi Kaltim Post, serta responden adalah para pelanggan di Kaltim Post setiap harinya.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa Kaltim Post memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada pemerintah kota Samarinda dalam perwujudan good governancenya. Perkembangan kontribusi Kaltim Post sendiri sudah berjalan sejak resmi didirikan. Seperti adanya halaman advertorial Pemkot Samarinda, mengawasi proses relokasi pedagang kaki lima (PKL), Membuat forum diskusi mengenai kemacetan di Samarinda, dan kontribusi melalui halaman Halo netizen untuk meningkatkan responsivitas Pemkot Samarinda dalam menerima keluhan masyarakat. Tanggapan masyarakat juga sudah cukup baik. Warga terbantu untuk mengawasi dan memantau perkembangan proses pembangunan pemerintah dengan berita dari Kaltim Post. Namun, masih ada berita-berita yang bersifat terlalu memojokkan pemerintah dan permasalahan data yang kurang lengkap serta sulit dimengerti. Hanya saja masih ada kontribusi yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, seperti halaman Halo Netizen yang belum efektif.

Kata kunci : good governance, Kaltim Post, Samarinda

Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupannya, manusia sebagai suatu bangsa tidak ingin terbelakang dan ketinggalan oleh perkembangan zaman. Disebutkan dalam pasal

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizaldy.reza@ymail.com

28F UUD 1945 yang diamandemen bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Media massa pada periode ini bisa dikatakan sangat berpengaruh. Melalui media massa kita bisa mendapatkan beragam informasi dan edukasi. Kemudian dapat dipahami pula posisi pers dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) sangatlah strategis. Pengaturan mengenai good governance sendiri belum diatur secara khusus oleh pemerintah dalam bentuk sebuah produk Undang-undang.

Konsep good governance seharusnya bisa dijalankan dengan baik oleh Pemerintah daerah. Meski demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan masih banyak program yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, seperti program pengendalian banjir dan kemacetan di Samarinda yang sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini didasari oleh pemberitaan pada media cetak Kaltim Post yang dilihat oleh penulis. Contohnya pada artikel Kaltim Post halaman 27 dengan rubrik Samarinda pada 3 Januari 2012 berjudul “Satpol PP Target Setahun Tertibkan PKL”.

Selain masalah kemacetan, bencana banjir tahunan yang hingga kini masih melanda Samarinda tidak pernah lepas dari pemberitaan Kaltim Post. Proyek pengendalian banjir yang diusung Pemerintah Kota ini dilihat belum optimal untuk mengatasi banjir di Samarinda. Artikel Kaltim Post sempat memberitakan bahwa proyek pengendalian banjir Samarinda tanpa target (Kaltim Post, 23 Januari 2014). Beberapa pemberitaan oleh Kaltim Post sebelumnya dapat dilihat kontribusi dari Kaltim Post dalam memberikan informasi tentang permasalahan yang dialami Pemerintah Kota Samarinda mengenai beberapa prinsip good governance, yakni partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan daya tanggap.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, bagaimana perkembangan kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Samarinda dari masa ke masa? *Kedua*, Bagaimana kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Samarinda? dan *Ketiga*, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori

Kontribusi

Menurut kamus ekonomi T. Guritno (1992) mendefinisikan kontribusi sebagai sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan, biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kemudian, Winardi (1982) mengartikan kontribusi sebagai sumbangan dari berbagai komponen yang dinilai, baik berupa barang maupun jasa.

Kaltim Post

Menurut Rakhmad dalam Masduki (2004), Pers adalah universitas besar dengan wartawan sebagai mahasiswanya. Pers bertugas mengamati realitas sosial dan menyampaikannya kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pers juga berfungsi sebagai pengubah ke arah yang lebih baik. Kaltim Post (dahulu Manuntung) adalah surat kabar harian pagi pertama yang terbit di provinsi Kalimantan Timur sejak 5 Januari 1988. Harian Kaltim Post yang berbasis di kota Balikpapan dan Samarinda, dan merupakan salah satu media di bawah Jawa Pos Group dengan oplah mencapai 64.800 eksemplar per hari.

Good Governance

Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service, sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (Sedarmayanti, 2003). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Transparansi

Menurut Krina (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Sedarmayanti, 2003).

Partisipasi

Bank Dunia dalam Suhartanta (2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.

Daya tanggap

Parasuraman dkk dalam Dwiyanto (2006) mengartikan Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

Pemerintah Kota Samarinda

Dikemukakan oleh Haryanto dkk, (1997) bahwa Pemerintah memiliki arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pemerintah hanyalah sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan Pemerintah dalam arti luas mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. Selain kota, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kabupaten. Kota dan kabupaten memiliki kedudukan yang sejajar dengan hak dan wewenang yang sama. Kabupaten/Kota diberi hak-hak dan kewajibannya sendiri dalam mengelola daerahnya.

Kontribusi Kaltim Post dalam good governance pada Pemerintah Kota Samarinda

Kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Samarinda adalah bagaimana keikutsertaan Kaltim Post sebagai pers nasional dalam membantu Pemerintah Kota mewujudkan konsep tata pemerintahan yang baik melalui empat prinsip-prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan daya tanggap. Kontribusi Kaltim Post dalam hal ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan tekanan dan solusi dalam setiap hambatan yang terjadi, contohnya memberikan masukan tentang mengatasi kemacetan dan memfasilitasi keluhan-keluhan dari masyarakat melalui beritanya.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti penulis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang tepat dan gambaran tentang Kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Samarinda dengan didukung data-data yang diperoleh di lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor Kaltim Post Samarinda, yakni dengan melakukan wawancara kepada pimpinan redaksi Kaltim Post.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *accidental sampling*. Adapun yang ditunjuk sebagai *key informan* adalah para pegawai di Kaltim Post, seperti pimpinan redaksi, redaktur dan wartawan yang bekerja di Kaltim Post serta sampel yang dijadikan responden merupakan masyarakat yang menjadi pelanggan di kantor Kaltim Post setiap harinya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu analisis data model alir yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Kontribusi Kaltim Post dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kota Samarinda dari Masa ke Masa

Sejarah Perkembangan

Kaltim Post yang saat itu masih bernama Manuntung, awalnya merupakan sebuah buletin yang diterbitkan oleh Humas dan Protokol Pemerintah Kota Balikpapan. Dengan maksud untuk menjadi media informasi bagi masyarakat mengenai program-program pemerintah pada saat itu. Manuntung akhirnya secara resmi berdiri pada 6 Januari 1988, yang diresmikan langsung Dahlan Iskan. Manuntung akhirnya resmi mengganti nama menjadi Kaltim Post pada tahun 1997, tepat di ulang tahun ke-9. Keterbukaan informasi publik yang diusung oleh Pemerintah Kota Samarinda sekitar tahun 1990 tentunya tak akan bisa tercapai tanpa adanya bantuan dari media massa. Manuntung yang merupakan satu-satunya media massa yang sudah berdiri pada saat itu menjadi satu-satunya perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Kontribusi saat Masih Bernama Manuntung

Sekitar tahun 1998 hingga 1999 Kaltim Post berhasil mendesak pemerintah kota untuk melakukan perbaikan jalan M. Yamin yang dahulu rusak parah. Pemberitaan tidak berhenti sampai disitu, dalam prosesnya mereka terus mengawal dengan memberikan informasi mengenai total anggaran, dan estimasi waktu yang dibutuhkan. Mengawal proses relokasi warga tak lepas dari pengamatan Kaltim Post. Warga sekitar sungai karang mumus dan juga karang asam dahulu berhasil direlokasi oleh Pemerintah Kota. Kaltim Post sebagai media massa memberikan sumbangsiah berupa informasi mengenai rencana relokasi tersebut.

Kendala yang Dihadapi Kaltim Post

Hambatan yang dialami oleh Kaltim Post dalam membantu perwujudan good governance pada Pemerintah Kota Samarinda saat masih bernama Manuntung. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dewan redaksi Kaltim Post Mukhransyah, ditemukan fakta bahwa hambatan yang dialami Kaltim Post dalam pemberitaannya adalah kesulitan untuk mendapatkan data dan adanya protes dari pemerintah terkait data yang disajikan. Protes kerap datang dari pemerintah apabila penyajian data yang diterbitkan tidak sesuai dengan data yang mereka berikan. Hal ini sering dialami oleh Kaltim Post pada masa lalu. Karena kurangnya koordinasi media dengan pemerintah, sehingga para wartawan yang hendak mencari data harus bisa mendapatkannya sendiri tanpa bantuan pemerintah.

Perbedaan Kontribusi Kaltim Post Dahulu dan Sekarang

Kemajuan teknologi sekarang tentunya sangat memudahkan para wartawan untuk mendapatkan data ataupun berita. Terlebih lagi didukung dengan Undang-

undang mengenai kebebasan pers yang merupakan titik balik dari pers nasional pada waktu itu. Sehingga pemerintah harus bersikap kooperatif kepada setiap pemburu berita untuk memberikan keterangan. Perbedaan lain terletak pada frekuensi halaman yang berbeda di masa lalu dan sekarang. Halaman Samarinda hanya mendapatkan jatah setengah halaman pada periode tersebut, sementara sekarang untuk halaman Samarinda sudah mendapatkan dua halaman penuh, ditambah dengan halaman Metropolis dan halaman utama.

No	Indikator	Masa Lalu	Sekarang
1	Frekuensi Halaman	1/2 Halaman	2-3 Halaman
2	Koordinasi Antar Wartawan dan Redaktur	Kurang	Baik

Kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kota Samarinda melalui empat indikator, yakni:

Transparansi

Kaltim Post juga memiliki halaman khusus untuk pemberitaan mengenai keberhasilan program kerja pemerintah. Halaman advertorial setiap harinya berisikan tentang perencanaan dari pemerintah, ataupun mengenai proyek yang sedang berjalan. Mekanisme halaman advertorial sendiri sepenuhnya diisi oleh humas dari Pemerintah di tiap daerah. Setelah itu dikoreksi sistem penulisan dan tata bahasa oleh redaktur yang bertugas menangani halaman tersebut. Melalui halaman advertorial ini Pemerintah bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan pembangunan di daerah. Tetapi, untuk membuatnya berimbang, Kaltim post tetap memberitakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi Pemerintah di setiap program kerjanya pada halaman lain.

Kontribusi lain dari Kaltim Post yang membantu Pemerintah Kota mewujudkan prinsip transparansi adalah dengan adanya kolom agenda kota pada halaman Kaltim Post. Kolom ini berisikan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota setiap harinya. Meskipun tidak semua agenda yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan rencana kegiatan penting yang akan dilaksanakan di Samarinda.

Akuntabilitas

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban mengenai setiap detail pekerjaan yang dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut bisa berupa informasi kepada masyarakat ataupun keberhasilan dalam mencapai target. Berikut ini penulis akan menjelaskan bagaimana kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan akuntabilitas Pemerintah

Kota Samarinda dalam menyelesaikan targetnya. Contoh kasusnya adalah proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Niaga Selatan.

Kontribusi Kaltim Post sebagai media massa bisa membantu Pemerintah kota Samarinda mewujudkan prinsip akuntabilitas tersebut. Contoh berita dari Kaltim Post yang memunculkan akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda adalah mengenai penertiban pedagang kaki lima. Pemberitaan yang dilakukan sebagai media informasi kepada masyarakat terkait perkembangan proses relokasi tersebut. Meskipun terjadi beberapa kali penundaan, akhirnya para pedagang berhasil direlokasi.

Partisipasi

Kaltim Post sebagai media informasi turut membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kaltim Post pernah membuat forum diskusi yang bertajuk Forum Kota. Forum Kota berlangsung dua kali, yakni pada 24 Desember 2011 dan 7 Januari 2012. Membahas tentang solusi menangani kemacetan di Samarinda yang dihadiri oleh pejabat-pejabat terkait, seperti Kasat Lantas Samarinda Kompol Rachmad Iswan Nusi, Kepala Dinas PU Kaltim Husinsyah, Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Zairin Zain, anggota DPRD Kaltim Andi Harun dan Rusman Ya'kub, serta Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi. Ketua dari forum ini adalah redaktur dari Kaltim Post, yakni Uways Alqadrie.

Dalam hal ini, kontribusi Kaltim Post adalah mewujudkan prinsip partisipatif dari Pemerintah Kota Samarinda melalui forum tersebut. Hasil dari forum tersebut selanjutnya akan menjadi acuan pemerintah untuk membuat kebijakan atau proyek. Salah satu hasil diskusi dari forum tersebut yang telah mendapatkan respon dari Pemerintah Kota Samarinda adalah pembangunan flyover di Air Hitam. Tentu saja pembangunan ini tidak terlepas dari kontribusi Forum Kota yang memberikan solusi mengenai pembangunan flyover.

Daya Tanggap

Dalam penerapan prinsip responsif, media bisa membantu masyarakat menuangkan keluhan dan masukannya kepada proses penyelenggaraan pemerintah. Kaltim Post telah menyediakan saluran untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. Pada awal tahun 2015 Kaltim Post meluncurkan rubrik terbaru dengan nama Halo Netizen. Halaman ini khusus berisikan semua keluhan dan masukan dari masyarakat. Mekanismenya, masyarakat yang ingin berkomentar bisa menyuarkan aspirasinya melalui media sosial facebook dan twitter milik Kaltim Post.

Selain itu, untuk membantu mewujudkan prinsip responsif pemerintah, Kaltim Post kerap membuat pemberitaan langsung mengenai keluhan masyarakat ini selain melalui halaman Halo Netizen. Fakta bahwa ketanggapan pemerintah dalam menanggapi keluhan dari masyarakat dapat dibantu melalui media massa. Seperti pada Kaltim Post yang menyediakan rubrik Halo Netizen untuk warga

menyampaikan aspirasinya. Kemudian berita mengenai krisis air bersih di perumahan elit tersebut juga menjadi bukti kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan sikap responsif pemerintah kota dalam mengatasi setiap masalah.

Tanggapan Masyarakat Mengenai Kontribusi Kaltim Post dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kota Samarinda

Kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan prinsip transparansi dari Pemerintah Kota Samarinda sudah baik dijalankan. Hanya saja, masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Seperti pengurangan kesalahan berita dan memperbanyak berita mengenai keberhasilan.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Terlebih lagi dengan adanya forum diskusi yang pernah diselenggarakan Kaltim Post. Bisa sangat memfasilitasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Selanjutnya akan ada solusi bersama untuk mengatasi permasalahan kota. Dalam membangun partisipasi masyarakat, sudah bisa dimunculkan melalui pemberitaan dan kegiatan-kegiatan internal yang dilakukannya. Melalui Kaltim Post, Pemerintah Kota Samarinda bisa mengetahui apa kemauan dari masyarakat untuk pembangunan kota. Forum Kota buatan Kaltim Post adalah satu contoh bagaimana Kaltim Post membangun tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah melaksanakan pembangunan kota. Tingkat responsif pemerintah sudah bisa terbantu melalui pemberitaan Kaltim Post. Dari beritanya, Pemerintah Kota Samarinda bisa merespon secara langsung atau melimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Namun, ada beberapa masukan dari masyarakat kepada Kaltim Post untuk perbaikan. Seperti pemberitaan yang lebih berani, pemberian data yang lebih lengkap dan tidak berbelit-belit, serta menyarankan Kaltim Post agar selalu bersikap netral dalam melakukan pemberitaan tanpa memihak kepentingan manapun.

Penutup

Kesimpulan

1. Perkembangan kontribusi Kaltim Post sendiri sudah berjalan sejak resmi didirikan. Pemberitaan yang dibuat dahulu bertujuan untuk melaporkan kinerja dari pemerintah kepada masyarakat. Kemudian diimbangi dengan berita permasalahan dari setiap proyek pemerintah tersebut. Beberapa kontribusi Kaltim Post Seperti membantu pemerintah melakukan relokasi pada warga di tepian mahakam dan mendorong pemerintah melakukan perbaikan di Jalan M. Yamin. Adapun kendala yang dialami Kaltim Post adalah tidak adanya dukungan dari pemerintah dan dukungan dari teknologi yang sangat berbeda dengan sekarang sehingga memudahkan wartawan untuk berkoordinasi.
2. Kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Samarinda dirasa cukup baik. Dari empat indikator yang

bahas dalam penelitian menurut penulis sudah cukup terbantu melalui pemberitaan di Kaltim Post. Seperti adanya halaman advertorial Pemkot Samarinda, mengawasi proses relokasi pedagang kaki lima (PKL), Membuat forum diskusi mengenai kemacetan di Samarinda, dan kontribusi melalui halaman Halo netizen untuk meningkatkan responsivitas Pemkot Samarinda dalam menerima keluhan masyarakat. Hanya saja masih ada kontribusi yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, seperti halaman Halo Netizen yang belum efektif.

3. Tanggapan masyarakat dari kontribusi Kaltim Post dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota sudah cukup baik. Warga terbantu untuk mengawasi dan memantau perkembangan proses pembangunan pemerintah dengan berita dari Kaltim Post. Contohnya pada pembangunan flyover di Air Hitam. Dengan pemberitaan yang kontinu dapat berguna untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya melewati jalan tersebut. Namun, masih ada berita-berita yang bersifat terlalu memojokkan pemerintah dan permasalahan data yang kurang lengkap serta sulit dimengerti.

Saran

1. Oleh karena kurangnya dukungan teknologi yang menjadi permasalahan Kaltim Post di masa lalu, maka seharusnya Kaltim Post bisa melakukan adaptasi dengan teknologi yang ada sekarang agar permasalahan dahulu tidak terulang kembali.
2. Mengingat masih adanya berita-berita yang bersifat memojokkan pemerintah, Kaltim Post harus meningkatkan lagi netralitasnya sebagai media. Jangan terlalu memihak kepada masyarakat ataupun pemerintah. Untuk menjaga keharmonisan antar kedua elemen tersebut.
3. Dari permasalahan data yang ditemui oleh beberapa responden, ada baiknya Kaltim Post menyajikan data yang lebih gampang untuk dicerna oleh masyarakat. Selain itu, keakuratan data yang disajikan juga lebih ditingkatkan lagi.

Daftar Pustaka

- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajahmada Universiti Press, Yogyakarta.
- Farazmand, Ali. 2004. *Sound Governance, Policy and Administrative Innovation*. Westport : Praeger.
- Haryanto dkk. 1997. *Fungsi-fungsi Pemerintahan*. Badan DIKLAT Depdagri, Jakarta.
- Ispandriarno, Lukas. 2014. *Media dan Politik. Sikap pers terhadap pemerintahan koalisi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Moleong, J Lexy. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Krina, Loina Lalolo, 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta
- Lupiyoadi, Rambat, 2001. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua*. Andi, Yogyakarta.
- Masduki. 2004. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Uli Press. Jogjakarta.
- Miles Matthew B. A. Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep R. Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pabundu, Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahmadi F, 1990. *Perbandingan Sistem Pers; Analisa Deskripsi Sistem Pers di Berbagai Negara*. Gramedia, Jakarta.
- Sarundajang, 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*. Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metodelogi Penelitian Survey (Edisi revisi)*. LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- T. Guritno, 1992, *Kamus Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa. Edisi Keempat*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Pasal 28f

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang *Kebebasan Pers*

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*

Sumber Internet :

<http://www.epaper.kaltimpost.co.id>

<http://www.kaltimpost.co.id>